

BAB IV

**EFEKTIVITAS PASAL 7 UU MIGAS TERKAIT KEGIATAN USAHA
POM MINI DALAM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN MIGAS DI
INDONESIA**

1. Gambaran Umum PT Pertamina Regional Malang Raya

PT Pertamina merupakan suatu perusahaan yang dimiliki negara Indonesia bergerak dalam bidang energi meliputi migas serta energi baru dan terbarukan. PT Pertamina dalam menjalankan kegiatan bisnisnya berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), disesuaikan dengan indikator *global best practice*, serta mencantumkan tata nilai korporasi yang sudah dipahami oleh seluruh unsur perusahaan, antara lain *Competitive, Clean, Customer-focused, Confident, Capable*, dan *Commercial* sehingga mampu bersaing pada era globalisasi. PT Pertamina memiliki pengalaman kurang lebih 56 tahun dengan berkomitmen menjalankan kegiatan bisnis secara profesional dan efisien serta penguasaan meliputi kegiatan hulu sampai hilir.

PT Pertamina juga berlandaskan pada kepentingan pelanggan memiliki peran dalam menentukan nilai tambah bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Usaha dalam perbaikan dan inovasi sesuai dengan tuntutan globalisasi dalam setiap kegiatannya dengan melaksanakan peran strategis perekonomian nasional. Semangat pembaharuan yang dipakai saat ini adalah wujud komitmen PT Pertamina dalam menciptakan alternatif terbaru untuk menyediakan sumber energi

yang lebih berkelanjutan dan efisien serta ramah lingkungan. Berlandaskan gagasan dalam meningkatkan manfaat dari sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan, PT Pertamina bergerak maju dengan langkah strategis untuk mewujudkan visi perusahaan yaitu menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.

PT Pertamina menetapkan strategi jangka panjang perusahaan yang disebut dengan “*Profitable in Downstream, Aggressive in Upstream*,” yaitu Perusahaan PT Pertamina memiliki upaya dalam melakukan perluasan bisnis pada sektor hulu dan menjadikan bisnis pada sektor hilir migas menjadi lebih menguntungkan dan efisien digunakan dalam mendukung visi PT Pertamina. PT Pertamina juga melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dengan terstruktur, sebagai wujud kepedulian serta tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh *stakeholder*-nya.

PT Pertamina menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi meliputi sektor hulu hingga hilir. PT Pertamina melakukan kegiatan usaha pada sektor hulu mencakup wilayah Indonesia dan luar negeri yaitu kegiatan dalam bidang-bidang produksi, eksplorasi, serta transmisi minyak dan gas. Dalam meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, PT Pertamina meningkatkan perluasan bisnis jasa pengeboran dan teknologi, serta bentuk lainnya terdiri atas pengembangan energi *thermal* bumi dan *Coal Bed Methane* (CBM). PT Pertamina beroperasi baik secara independen maupun melakukan pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu *Technical Assistance Contract* (TAC), Kerja Sama Operasi (KSO), dan *Indonesia Participating/ Pertamina Participating Interest* (IP/PPI).

kegiatan produksi panas bumi oleh PT Pertamina dilakukan di dalam negeri bertujuan untuk membantu program dari pemerintah dengan menyuplai kurang lebih 10.000 Mega Watt (MW) listrik pada tahap kedua.

Potensi cadangan gas metana Indonesia yang besar dikelola secara maksimal dimana saat ini PT Pertamina sudah memiliki 6 *Production Sharing Contract* (PSC)-CBM. Sektor hilir PT Pertamina meliputi niaga dan pemasaran produk dari hasil pengolahan migas dan petrokimia, bisnis bidang perkapalan dalam peningkatan pendistribusian produk Perusahaan. Kegiatan pengolahan terdiri dari: RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), dan wilayah lainnya. Selanjutnya, PT Pertamina juga melakukan operasi pada Unit Kilang LNG Bontang (Kalimantan Timur) dan Unit Kilang LNG Arun (Aceh). Sedangkan produk yang dihasilkan antara lain bahan bakar minyak (BBM) seperti minyak tanah, premium, solar, dan Non BBM antara lain aspal, pelumas, *Musicoil*, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), serta *Liquefied Natural Gas* (LNG), dan produk lainnya.

Selain itu Direktorat Gas, Energi Baru dan Terbarukan mengelola bisnis Gas, *Power*, dan NRE sebagai inti dari bisnis PT Pertamina untuk memperkuat *business positioning* dan daya saing, mengoptimalkan profit serta mendukung *business sustainability* Perseroan. Strategi yang dilakukan antara lain: ⁵¹

1. Ekspansi pasar baru untuk mengakselerasi bisnis Direktorat GEBT di bidang Gas, *Power*, dan NRE;

⁵¹ <http://www.pertamina.com/company-profile/>, Diakses tanggal 11 Oktober 2017 WIB.

2. Mengembangkan *resources* dan bisnis baru sebagai *new growth engine*; dan
3. Mengembangkan penguasaan pasar Gas, *Power*, dan NRE dengan mengamankan sisi pasokan, serta meng-*create* dan memperluas pasar untuk mengembangkan skala bisnis melalui optimalisasi bisnis eksisting dan penguasaan *resources* baru.

Dan untuk mendukung dari tiga (3) strategi PT Pertamina diatas, PT Pertamina juga memiliki lima (5) Prioritas Strategis Pertamina yang termuat dalam buku Laporan Tahunan PT Pertamina pada tahun 2016, antara lain:⁵²

1. Pengembangan Sektor Hulu :

- a. Pengembangan internasional: Algeria, M&A Internasional lain;
- b. Akselerasi pengembangan *Geothermal* & EBT;
- c. Pengambilalihan dan pengembangan blok utama Indonesia: Mahakam, Cepu, ONWJ;
- d. *Operations Excellence* (Pemboran, EOR, Efisiensi); dan
- e. Eksplorasi

2. Efisiensi di Semua Lini

- a. Reformasi pengadaan minyak mentah dan produk minyak melalui ISC yang berkelas dunia.
- b. *Streamlining* fungsi-fungsi korporasi;
- c. Penekanan *losses* di semua lini operasi, hulu, kilang, transportasi laut & darat;

⁵² Laporan Tahunan Pertamina 2016, Merangkul Perubahan, Mendayagunakan Tantangan, Hlm. 8-9, http://www.pertamina.com/media/6c285812-6209-4e2f-a9e56b8f6e3055ad/AR_Pertamina_2016.pdf, Diakses tanggal 11 Oktober 2017, Pukul 20.58 WIB.

- d. Sentralisasi *marketing*; dan
- e. Sentralisasi pengadaan.

3. Peningkatan Kapasitas Kilang dan Petrokimia

- a. Revitalisasi & integrasi kilang;
- b. Kilang baru (*Grass Root Refinery Project*); dan
- c. swasta *Upgrade* kilang (*Refinery Development Master Plan*).

4. Pengembangan Infrastruktur dan *Marketing*

- a. Peningkatan kapasitas *storage & terminal*;
- b. Pengembangan infrastruktur *receiving &* regasifikasi LNG serta SPBG;
- c. Pengembangan jaringan SPBU & pemasaran bertaraf internasional;
- d. *Go International*; dan
- e. *Marketing Operation Excellence*.

5. Perbaikan Struktur Keuangan

- a. Penyelesaian piutang ke negara
- b. Penyelarasan strategi pembiayaan jangka pendek dan panjang
- c. Pengelolaan perencanaan & evaluasi investasi

a. Peran PT Pertamina dalam Mendukung Kemandirian Energi dan Perekonomian Indonesia⁵³

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PT Pertamina memiliki peran dalam mendukung kemandirian energi dan perekonomian Indonesia, diantaranya:

1. Menjaga Pasokan BBM

⁵³ Laporan Tahunan Pertamina 2016, Merangkul Perubahan, Mendayagunakan Tantangan, Hlm. 16, http://www.pertamina.com/media/6c285812-6209-4e2f-a9e56b8f6e3055ad/AR_Pertamina_2016.pdf, Diakses tanggal 11 Oktober 2017 pukul 21.21 WIB.

Upaya yang dilakukan dalam menjaga pasokan BBM seiring peningkatan kebutuhan BBM di Indonesia dari tahun ke tahun antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas *storage* dan *upgrading* fasilitas terminal BBM (TBBM);
- b. Otomatisasi suplai dan logistik secara menyeluruh (*End-to-end data automation*);
- c. Optimalisasi *master program* dan pola suplai BBM;
- d. Menyewakan *storage* domestik ke pasar internasional;
- e. Menerapkan standar PROPER dan Pertamina *Operation & Service Excellence* (POSE) di setiap TBBM; dan
- f. Menerapkan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia.

2. Menjamin Distribusi BBM

Dalam menjamin distribusi BBM ke seluruh pelosok Indonesia, Pertamina menjalankan fungsi selaku *logistic provider* bagi lini bisnisnya, mulai dari penerimaan, pengelolaan dan penyimpanan hingga penyaluran produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, melalui pengoperasian dan pengelolaan infrastruktur sebagai berikut:

- a. 116 Terminal BBM;
- b. 64 Depot Pengisian Pesawat Udara;
- c. 5.407 Jaringan SPBU;
- d. 59 Unit Tanker Milik dan 160 Tanker Charter;
- e. 6 Ship to Ship Transfer (STS);

- f. 107 Terminal Khusus (Tersus) dan TUKS;
- g. 167 Dermaga;
- h. 13 *Single Point Mooring* (SPM);
- i. 10 *Central Buay Mooring* (CBM);
- j. 126 Kapal Kecil Ringan (KKR);
- k. 2 *Bitumen Plant*; dan
- l. 2 *Chemical Storage Plant*.

2. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pom Mini di Kota Batu

a. Letak Geografis Kota Batu

Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 871 m di atas permukaan laut.

Kota Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah:

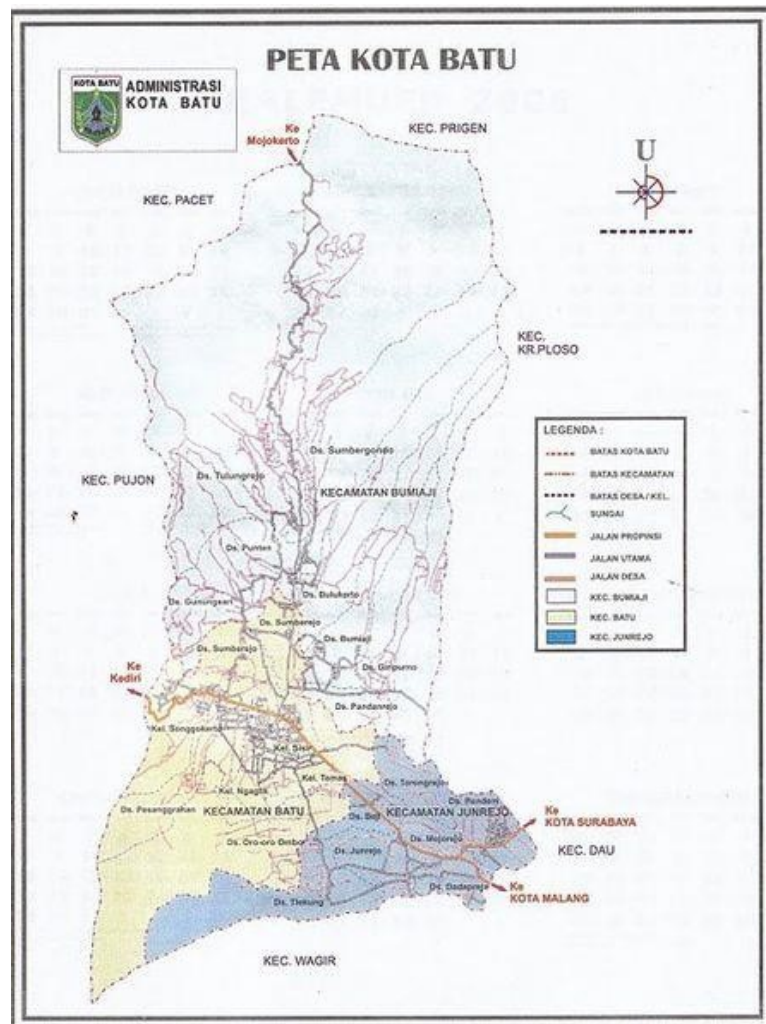
- a. Gunung Anjasmoro (2277 m)
- b. Gunung Arjuno (3339 m)
- c. Gunung Banyak
- d. Gunung Kawi (2651 m)
- e. Gunung Panderman (2040 m)
- f. Gunung Welirang (2156 m)

Secara astronomis Kota Batu terletak pada $112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'11''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Sedangkan batas administratif wilayahnya berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang ;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang ;
dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Jika ditinjau dari letak geografis diatas ersebut, maka dapat juga dilihat dari peta kota Batu seperti dibawah ini.

Gambar 3
Peta Kota Batu



Sumber : Diolah dari data sekunder, 2017

Kota Batu merupakan ibu kota Batu, Jawa Timur yang memiliki wilayah seluas kurnag lebih 197,087 km² dan terbagi dalam tiga (3) wilayah kecamatan yaitu Bumiaji, Batu, dan Junrejo. Kota Batu juga memiliki empat (4) kelurahan, dan 19

desa, dengan jumlah penduduk kurang lebih 168.155 jiwa pada tahun 2001.⁵⁴ Kecamatan Bumiaji adalah kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah 12.797,89 ha, sedangkan Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo masing-masing memiliki luas wilayah ayitu kurang lebih 4.545,81 ha dan 2.565,02 ha.

Jika dilihat dalam letak geografinya, Kota Batu dapat dibagi menjadi 4 jenis tanah. Pertama jenis tanah Andosol yang merupakan tanah yang paling subur meliputi Kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha, Kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 ha dan Kecamatan Bumiaji seluas 2.873,89 ha. Jenis kedua adalah tanah Kambisol yang merupakan jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, Kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji 1395,81 ha. Jenis ketiga adalah tanah alluvial yang merupakan tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi Kecamatan Batu seluas 239,86 ha, Kecamatan Junrejo 199,93 ha dan Kecamatan Bumiaji 376,48 ha. Dan yang terakhir adalah jenis tanah Latosol mencakup Batu seluas 260,34 ha, Kecamatan Junrejo 217,00 ha dan Kecamatan Bumiaji 408,61 ha.⁵⁵

Sebagai wilayah pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki panorama Alam yang indah dan berudara sejuk yang menjadi daya tarik dan minat masyarakat lain untuk mengunjungi Batu. Pada awal abad 19, Kota Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya bagi orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda mulai membangun tempat-tempat Peristirahatan (Villa) dan bahkan bermukim di wilayah tersebut. Situs dan bangunan-bangunan semasa Pemerintahan Hindia Belanda masih berdiri kokoh dan

⁵⁴ <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/batu.pdf>, Diakses tanggal 05 November 2017 pukul 15.02 WIB.

⁵⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/10957/6/bab%203.pdf>, Diakses tanggal 05 November 2017 pukul 15.05 WIB.

bahkan menjadi aset serta kunjungan Wisata hingga saat ini. Dan bahkan Bangsa Belanda bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat sebagai *De Klein* Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa karena keindahan alamnya. Peninggalan arsitektur dengan corak Eropa pada penjajahan Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama alam yang indah di kawasan Batu sempat membuat Bapak Proklamator sebagai *The Father Foundation* of Indonesia yaitu Bung Karno dan Bung Hatta setelah Perang Kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat di kawasan Selecta Batu.⁵⁶

b. Visi Dan Misi Kota Batu

Kota Batu memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan menjadi kota yang besar dan berdaya saing tinggi, yakni⁵⁷:

1. Visi

Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional.

Yakni ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumberdaya (alam, manusia dan budaya) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Misi

- a. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama;
- b. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
- c. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik;

⁵⁶ <http://website.batukota.go.id/statis-14-geografis-kota-batu>, Diakses tanggal 05 November 2017 pukul 15.15 WIB.

⁵⁷ <http://website.batukota.go.id/statis-2-visi-dan-misi>, Diakses tanggal 05 November 2017 pukul 15.30 WIB.

- d. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional;
- e. Optimalisasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan;
- g. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- h. Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas;
- i. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat;
- j. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis Dan Demokratis; dan
- k. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM.

c. Sejarah Kota Batu

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah tersebut meliputi daerah pegunungan dengan tempat yang nyaman karena udara yang sejuk, keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok , seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah oleh Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti. Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang diduga sakti mandraguna mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan serta membangun sebuah candi yang diberi nama Candi Supo. Sesuai dengan keinginan Raja, ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris

yang bertuah sebagai benda pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural (*Magic*), akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan sumber air panas tersebut hingga saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti.

Wilayah Kota Batu yang terletak di dataran tinggi kaki Gunung Panderman dengan ketinggian kurang lebih 700 - 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "B A T U" mulai disebut untuk memberikan nama kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Melihat ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka masyarakat yang memulai babat alas dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Batu, sebenarnya Abu

Ghonaim sendiri adalah berasal dari Jawa Tengah. Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah di kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni).

Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan buruknya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Bermula mereka hidup dalam kelompok (komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai. Sebagai layaknya Wilayah Pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki Panorama Alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri.⁵⁸

d. Lambang Kota Batu Beserta Artinya

Kota Batu mengalami perubahan lambang dari tahun ke tahun hingga sekarang ini digunakan oleh Pemerintahan Daerah tersebut yang memiliki bentuk sebagai berikut:

Gambar 4
Lambang Kota Batu

⁵⁸ <http://website.batukota.go.id/statis-12-sejarah-kota-batu>, Diakses tanggal 05 November 2017 pukul 15.45 WIB.



Sumber : Diolah dari data sekunder, 2017

Lambang diatas memiliki arti sebagai berikut:

1. Gambar Bintang

Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bermakna meskipun berbeda suku, agama, dan pandangan hidup tetap menjunjung tinggi kerukunan umat beragama.

2. Gambar Padi dan Kapas

Melambangkan pangan dan sandang yang terdiri dari padi berjumlah 17 dan kapas berjumlah 10 mempunyai makna tanggal dan bulan peresmian Kota Batu.

3. Gambar Gunung

Melambangkan kekuatan dan kebesaran yaitu Kota Batu berada pada lereng Gunung Panderman, gunung Arjuno, dan Gunung Welirang yang memiliki kekayaan alam yang cukup besar terutama mata air yang menyatu menjadi sungai brantas, serta keanekaragaman flora dan fauna sehingga menjadi daya tarik wisata.

4. Gambar Keris

Berwarna keemasan dengan posisi tegak yang melambangkan jiwa ksatria, kekuatan, ketajaman pikir, batin dan perjuangan yang pantang menyerah serta kepribadian yang berbudaya untuk mencapai Kota Batu kedepan.

5. Gambar Rantai

Warna hitam yang melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia. Rantai berjumlah tiga diartikan bahwa hubungan antara Manusia dengan Tuhan serta alam dan sesamanya adalah unsur yang tidak terpisahkan.

6. Gambar Candi

Melambangkan sistem pemerintahan Kota Batu yang tertib, rapi, dan teratur.

7. Warna Dasar Hijau

Dengan gambar filosofi petak-petak sawah melambangkan Kota batu adalah daerah Agraris, mengandung arti filosofi "Gemah Ripah Loh Jinawi" (Daerah subur) dan sebagian besar masyarakatnya bertani.

8. Gambar Air

Melambangkan subur kehidupan yang lestari.

9. Bentuk Perisai

Memiliki 5 sisi yang melambangkan pemerintah Kota Batu berdasarkan Pancasila sebagai Dasar negara Republik Indonesia.

10. Warna Merah Putih

Melambangkan Bendera Indonesia.

11. Tulisan Kota Batu

Menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Batu.

12. Hakaryo Guno Mamayu Bawono

Merupakan makna Condro Sengkolo yang mengandung arti Berkarya Guna Membangun Negara. Condro Sengkolo 1934 adalah Tahun Jawa yang merupakan peresmian Pemerintah Kota Batu dengan nilai kata : Hakaryo = 4, Guno = 3, Mamayu = 9, Bawono = 1 berjumlah 17, sebagai tanggal peresmian Kota Batu,

dengan jumlah suku kata 11 bermakna dasar Hukum peresmian Kota Batu diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001.⁵⁹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Batu memiliki daya tarik sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman ini. Hal ini yang membuat jumlah pengunjung di Kota Batu setiap tahun mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan banyak juga permukiman berupa perumahan yang tersebar diseluruh wilayah kota Batu. Dari segi perkembangan ekonomi dan bisnis, Kota Batu juga mengalami perkembangan sangat pesat. Sehingga jumlah konsumsi BBM di wilayah Kota Batu juga sangat besar dan meningkat setiap tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan BBM di wilayah Kota Batu, terdapat tiga (3) SPBU yang tersebar di wilayah tersebut antara lain : Jalan Panglima Sudirman, Jalan Songgoriti dan Jl. Ir. Soekarno.⁶⁰ Ketiga SPBU tersebut sudah tersebar di berbagai wilayah di Kota Batu. Tetapi, dalam kenyataan di lapangan bahwa pendistribusian BBM di wilayah Kota Batu belum tersebar dengan merata. Karena SPBU tersebut hanya berada di wilayah jalur utama jalan antar kota. Sehingga masyarakat banyak yang mendirikan kegiatan usaha pergadangan eceran BBM muali dari tradisional hingga menggunakan alat yang disebut Pom Mini.

Perkembangan usaha Pom Mini di Kota Batu dimulai sejak tahun 2016. Dimana usaha tersebut didirikan karena terdapat peluang usaha dimana kebutuhan BBM di masyarakat semakin tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Berawal dari

⁵⁹ <http://website.batukota.go.id/statis-13-makna-lambang-kota-batu>, Diakses tanggal 05 November 2017 pukul 15.45 WIB.

⁶⁰ https://www.google.co.id/search?source=hp&ei=RbMmWrFLM4POvgTPs6OAAQ&q=SPBU+kota+batu&oq=SPBU+kota+batu&gs_l=psyab.3..0.62699.66634.0.67392.15.14.0.0.0.360.1776.0j5j1j2.8.0....1.1.64.psy-ab..7.8.1772.0..0i131k1j0i22i30k1.0.rgmkytj1XIY, Diakses tanggal 06 November 2017 pukul 22.00 WIB.

penjualan BBM dengan sistem eceran yang berkembang di masyarakat dirasa kurang efisien dan menarik minat pembeli. Kemudian muncullah sistem penjualan BBM dengan menggunakan alat yang digunakan seperti yang ada di SPBU. Alat-alat tersebut berasal dari penjualan oleh CV tertentu dengan harga berkisar antara Rp.12.500.000 – Rp. 22.000.000,- sesuai dengan permintaan dan spesifikasi alat yang akan digunakan tersebut.⁶¹

Dengan menggunakan alat tersebut, jumlah pembeli menjadi semakin meningkat karena alat tersebut hampir sama jumlah literanya (tidak ada pengurangan ukuran per literanya) daripada menggunakan botol yang digunakan oleh pedagang BBM eceran. Omsetnya atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan BBM menggunakan sistem Pom Mini juga banyak dan meningkat dibandingkan menggunakan botol eceran.

Tetapi dari hasil wawancara kepada pelaku usaha Pom Mini tersebut, penulis menemukan bahwa usaha Pom Mini tersebut kebanyakan belum mempunyai izin usaha.⁶² Padahal, Pom Mini tersebut menggunakan alat yang cukup canggih seperti yang digunakan dalam SPBU. Mereka juga bingung untuk mengurus izin usaha tersebut dikarenakan dalam peraturan daerah kota Batu belum mengatur tentang jenis kegiatan usaha Pom Mini tersebut. Padahal, dalam memperoleh BBM yang akan dijual, pelaku usaha Pom Mini memperoleh BBM tersebut melalui SPBU di sekitarnya.⁶³

Sedangkan hasil dari wawancara oleh pihak PT Pertamina di Surabaya, pihak Legal Staff menjelaskan bahwa kegiatan usaha Pom Mini tersebut ilegal

⁶¹ Hasil wawancara pemilik Usaha Pom Mini Kota Batu pada tanggal 04 November 2017.

⁶² Hasil wawancara pemilik Usaha Pom Mini Kota Batu pada tanggal 04 November 2017.

⁶³ Hasil wawancara pemilik Usaha Pom Mini Kota Batu pada tanggal 04 November 2017.

karena tidak ada pengaturan baik dalam pengaturan oleh PT Pertamina maupun dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha Pom Mini di kota Batu tersebut adalah kegiatan ilegal dan melanggar aturan.⁶⁴

A. Efektivitas Pasal 7 UU Migas terkait kegiatan usaha Pom Mini dalam penyelenggaraan perdagangan Migas di Indonesia

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina bertujuan untuk mengelola minyak dan gas bumi agar terdistribusikan secara merata diseluruh wilayah Indonesia hingga ke wilayah terpencil. Dalam melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah sesuai dengan pengaturan UU Migas sudah membentuk badan independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan yang berdasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002, yang selanjutnya disebut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU Migas khususnya terkait kegiatan usaha hilir Migas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.⁶⁵

⁶⁴ Hasil wawancara dengan pihak Staf Legal PT Pertamina Surabaya pada tanggal 06 November 2017.

⁶⁵ <http://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas>, Diakses tanggal 06 November 2017 pukul 17.00 WIB.

Dasar hukum pembentukan BPH Migas tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) UU Migas bahwa “Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)”. BPH Migas memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Migas yang berbunyi “Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri”.⁶⁶ Dan tugas-tugas diamanahkan oleh Pemerintah kepada BPH Migas meliputi pengaturan dan penetapan antara lain⁶⁷:

- a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
- b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
- c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
- d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan
- f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

Selain tugas-tugas tersebut, BPH Migas juga memiliki wewenang untuk⁶⁸:

⁶⁶ Pasal 46 ayat (2) UU Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁶⁷ Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁶⁸ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

- a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- b. menetapkan volume alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi cadangan nasional Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah;
- c. menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;
- d. menetapkan tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekn oekonomi;
- e. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;
- f. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- h. mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dan menetapkan biaya hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; dan
- i. Memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada ruas tertentu dari transmisi Gas Bumi dan pada wilayah tertentu dari

jaringan distribusi Gas Bumi melalui lelang, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

BPH Migas sebagai pihak regulator atau pembuat aturan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir Migas, sedangkan pihak PT Pertamina merupakan operator atau pelaksana dalam ketersediaan dan pendistribusian BBM ke seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya hingga hari ini, pendistribusian BBM masih belum merata. Walaupun sudah ada agen dan SPBU, masyarakat mulai mendirikan usaha pedagang eceran BBM dimana yang semula perdagangan eceran BBM dilarang oleh PT Pertamina, sekarang ini dibolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan sekarang ini, banyak masyarakat yang memulai usaha penjualan BBM eceran menggunakan alat seperti yang dimiliki oleh SPBU yang dikenal dengan Pom Mini atau Pertamina Mini. Dalam bisnis tersebut, pelaku usaha tersebut mencari keuntungan yang tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini menyalahi aturan perundang-undangan baik dalam mendirikan hingga proses bisnis tersebut. Dan pendirian usaha tersebut (Pom Mini) belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kasus dan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis menunjukkan bahwa pasal 7 dalam UU Migas menyatakan bahwa:

Ayat 1 bahwa “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20” . Dan ayat 2 menyatakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Dalam hal ini Pom Mini yang didirikan oleh pelaku usaha masyarakat jelas melanggar aturan tersebut. aturan yang dilanggar yakni terkait izin usaha pendirian Pom Mini oleh masyarakat. Di pihak PT Pertamina dan BPH Migas Tidak ada penindakan dalam pendirian usaha Pom Mini baik mulai dari penyediaan alat yang menyerupai mesin yang ada di SPBU, izin usaha dan

pengawasannya.⁶⁹ Sehingga terjadinya pembiaran yang berlarut-larut tanpa adanya kontrol dari pemerintah. Padahal Pom Mini di Kota Batu merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja (K3) apabila terjadi sesuatu kerusakan atau bencana.⁷⁰ Dan juga jika dilihat dari peluang usaha tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan keuntungan. Sehingga pemerintah bisa menarik pajak atas izin usaha tersebut. Tetapi, Pom Mini belum dimasukkan ke dalam klasifikasi kegiatan usaha dalam peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan pada sub bab-sub bab sebelumnya sudah menemui titik temu, bahwa dalam pendirian usaha Pom Mini di Kota Batu, para pelaku usaha tersebut telah melanggar aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Pasal 7 UU Migas tersebut menjadi kurang efektif. Hal tersebut didasarkan pada beberapa pengaturan yang termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Bahwa dalam mendirikan usaha terkait dengan pendistribusian BBM ke masyarakat atau konsumen langsung, maka pelaku usaha tersebut harus mendirikan atau mempunyai badan usaha. Yang dimaksud dengan badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah

⁶⁹ Hasil wawancara dengan pihak Staf Legal PT Pertamina Surabaya pada tanggal 06 November 2017.

⁷⁰ Hasil wawancara pemilik Usaha Pom Mini Kota Batu pada tanggal 04 November 2017.

Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷¹ Sedangkan pelaku usaha Pom Mini mendirikan usaha tersebut belum menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷²

2. Bahwa dalam mendirikan usaha terkait dengan pendistribusian BBM ke masyarakat atau konsumen langsung, maka badan usaha tersebut harus memiliki izin usaha. Yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.⁷³ Sedangkan dari hasil wawancara kepada beberapa pelaku usaha Pom Mini di Kota Batu menunjukkan bahwa mereka belum memiliki dan mengurus terkait perizinan untuk mendirikan usaha Pom Mini. Dan izin usaha tersebut harus memuat paling tidak⁷⁴:

⁷¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁷² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

⁷³ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁷⁴ Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- d. syarat-syarat teknis.

Dan dalam PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan gas Bumi Pasal 43 menyebutkan bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.

Setelah mendapatkan izin usaha dari Menteri, Badan Usaha memiliki kewajiban antara lain⁷⁵:

- a. Menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi Niaganya;
- b. Menjamin ketersediaan Gas Bumi melalui pipa secara berkesinambungan pada jaringan distribusi Niaganya;
- c. Menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar, Lain dan/atau Hasil Olahan pada tingkat yang wajar;
- d. Menjamin penyediaan fasilitas Niaga yang memadai;
- e. Menjamin standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. Menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan; dan

⁷⁵ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

- g. menjamin penggunaan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku.

Dari penjabaran poin satu (1) dan dua (2) sudah jelas bahwa Pom Mini tersebut belum memenuhi syarat dari aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundangan yang masih berlaku di Indonesia dan kegiatan usaha tersebut adalah illegal. Sehingga, menyebabkan Pasal 7 UU Migas tersebut belum menjadi efektif dalam penerapannya. Dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PT Pertamina kurang kuat dan menyeluruh hingga masuk ke daerah-daerah.

Dalam muatan pasal 7 UU Migas, seharusnya kegiatan usaha Pom Mini tergolong dalam kegiatan usaha hilir yakni dalam hal praktik penjualan maupun pendistribusian BBM ke masyarakat. Sehingga, pasal 7 UU Migas tersebut tidak efektif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang memiliki fungsi membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan. Yaitu hasil cipta, karya, dan rasa yang berlandaskan pada karsa manusia di pergaulan hidup.

Dalam uraian diatas terkait teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, maka kasus pendirian usaha Pom Mini membuat aturan hukum yang dimuat dalam pasal 7 UU Migas tidak efektif. Ketidakefektifitasnya aturan hukum tersebut ada beberapa faktor, diantaranya :

1. Belum adanya payung hukum atau dasar aturan dalam pendirian usaha Pom Mini yang secara spesifik, karena kegiatan usaha Pom Mini belum termasuk dalam peraturan perundang-

undangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah;

2. Struktur penegak hukum yang belum berjalan dalam hal pengawasan kegiatan usaha tersebut;
3. Faktor sarana penegakan hukum, yakni sistem untuk melakukan peninjauan dan pengawasan yang ada dimasyarakat kurang berjalan karena terjadi pembiaran yang berlarut-larut oleh pemerintah dalam hal ini pihak PT Pertamina dan BPH Migas; dan
4. Faktor kebudayaan yang hidup di masyarakat bahwa, hukum diciptakan oleh masyarakat dan dilegalkan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan hukum untuk mengatur masyarakat agar masyarakat menjadi tertib, aman dan sejahtera.

B. Upaya PT Pertamina Dalam Penyelesaian Sengketa Kegiatan Usaha Pom Mini Di Kota Batu

Hukum hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat sehingga menciptakan kondisi yang damai, teratur dan sejahtera. Hukum diciptakan untuk menanggulangi suatu permasalahan baik yang sudah terjadi maupun yang belum atau akan terjadi. Sesuai dengan isi Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan upaya hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi setiap warga negara.

Yang dimaksud dengan upaya dalam KBBI adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan

sebagainya.⁷⁶ Sedangkan Hukum memiliki pengertian dalam KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah⁷⁷.

Sedangkan yang dimaksud dengan upaya hukum adalah segala bentuk usaha untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap suatu peristiwa hukum yang akan maupun sedang terjadi. Upaya-upaya hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷⁸ Terdapat pendapat dari beberapa ahli terkait dengan pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum yaitu perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati dan menjalankan semua hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷⁹

⁷⁶ <https://kbbi.web.id/upaya>, Diakses tanggal 07 November 2017 pukul 14.25 WIB.

⁷⁷ <https://kbbi.web.id/hukum>, Diakses tanggal 07 November 2017 pukul 14.30 WIB.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

⁷⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 98

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁰ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Dapat disebut perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur, antara lain:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
- d. Sanksi hukuman apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran.

Dari penjelasan dari para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yaitu upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subyek hukum, baik bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum dapat disebut sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dengan konsep hukum memberikan suatu ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kedamaian.⁸¹ Dalam menjalankan dan

⁸⁰ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, CitraAdityaBakti, Bandung, 2000, hlm. 69.

⁸¹ Janus Sidablok, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 37-38.

memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yang kemudian disebut dengan sarana perlindungan hukum. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Upaya hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸² Yang selanjutnya dapat dijabarkan dibawah ini:

1. Upaya Hukum Preventif

Pada upaya hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Upaya hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi..

2. Upaya Hukum Represif

Upaya hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.⁸³

⁸² Phillipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hlm.29.

⁸³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, **Hukum Tata Negara Indonesia**, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 102.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas asas perlindungan dan pengakuan terhadap martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dari penjabaran diatas sudah diuraikan terkait teori-teori dan konsep perlindungan hukum. Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka sangat dibutuhkan upaya hukum baik preventif maupun represif untuk mencapai keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian baik dari pihak pemerintah yang diwakili oleh PT Pertamina maupun masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha Pom Mini. Maka, upaya hukum yang dilakukan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif Penyelesaian Sengketa antara PT Pertamina dan Pelaku Usaha Pom Mini dalam Pendirian Pom Mini di Kota Batu

Seperti yang sudah dijabarkan diatas bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum preventif adalah upaya dalam pencegahan sebelum terjadinya sengketa atau permasalahan. Sehingga dalam permasalahan yang penulis angkat dimana terjadi permasalahan antara pihak PT Pertamina dengan pelaku usaha Pom Mini terkait perdagangan BBM yang ada di masyarakat. Untuk mencegah agar permasalahan tersebut tidak menyebar, maka pemerintah bisa turun tangan dengan mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan baik berupa Peraturan Daerah hingga Peraturan Pemerintah. Sehingga antara pihak PT Pertamina dengan pelaku usaha

Pom Mini tidak ada yang dirugikan dan peraturan tersebut dalam mencakup wilayah yang lebih luas. Setelah produk peraturan perundang-undangan tersebut disahkan, perlu adanya sosialisasi ke masyarakat dan melakukan dengan pendapat serta masukan untuk penyempurnaan aturan tersebut.

Tetapi, dalam kasus yang diteliti oleh penulis, pihak PT Pertamina dan BPH Migas melakukan pembiaran atas kejadian tersebut. Seharusnya, kedua pihak tersebut melakukan pengecekan lapangan bagaimana alur pendistribusian BBM dari hulu hingga hilir dan jatuh ditangan konsumen. Pengecekan kondisi sosial masyarakat perlu ditinjau dan dikaji ulang karena ada beberapa hal atau terobosan kreatif yang muncul dalam sistem perdagangan mereka. Dan apabila menemukan keanehan atau keunikan dalam proses pendistribusian BBM ke masyarakat segera dilakukan penanganan agar tidak berlarut-larut dan sistem cepat tanggap.

2. Upaya Represif Penyelesaian Sengketa antara PT Pertamina dan Pelaku Usaha Pom Mini dalam Pendirian Pom Mini di Kota Batu

Seperti yang sudah dijabarkan diatas bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum represif adalah upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu antara pihak PT Pertamina dan pelaku usaha Pom Mini di Kota Batu adalah apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pom Mini dalam menjalankan kegiatan usahanya perdagangan BBM ke masyarakat. Sehingga permasalahan tersebut dapat diajukan ke lingkup peradilan umum karena jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan dan usaha tersebut termasuk usaha

illegal. Dengan adanya kontrol dari PT Pertamina dan BPH Migas, maka diharapkan tidak terjadi penyelewengan pendistribusian BBM di wilayah Kota Batu karena para pelaku usaha Pom Mini dalam membeli BBM yang akan dijual berasal dari SPBU terdekat. Sehingga mengurangi kuota volume BBM di SPBU tersebut.⁸⁴

Dalam konteks permasalahan yang ada di Kota Batu, maka alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak PT Pertamina dan pelaku usaha Pom Mini di Kota Batu yaitu melakukan mediasi antara pihak PT Pertamina dengan pelaku usaha Pom Mini Kota Batu yang hasil diskusi tersebut akan memunculkan kesepakatan dan diberlakukan khusus di wilayah Kota Batu. Sehingga hasil dari mediasi tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan aspirasi dari masyarakat juga terakomodir dengan baik. Terutama kendala yang didapat para pelaku usaha Pom Mini adalah dalam pengurusan izin usaha pendirian Pom Mini tersebut. sehingga diharapkan pengurusan izin tersebut dipermudah dan cepat serta menjadi usaha yang legal.

Setelah itu juga membentuk satuan tugas untuk melakukan pendataan ulang mulai dari jumlah pendirian usaha, pelaku usaha dan sistem pengawasannya agar tidak terulang kembali kejadian yang serupa. Sehingga pemerintah cepat tanggap dalam melakukan penindakan dan melindungi masyarakat. Dari pihak PT Pertamina tidak setuju dengan penggunaan logo milik PT Pertamina karena bukan merupakan produk kebijakan langsung dari mereka.⁸⁵

⁸⁴ Hasil wawancara pemilik Usaha Pom Mini Kota Batu pada tanggal 04 November 2017.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan pihak Staf Legal PT Pertamina Surabaya pada tanggal 06 November 2017.

Dan juga seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat dan detail oleh pihak PT Pertamina dan BPH Migas dalam pendistribusian BBM khususnya di Kota Batu sehingga tidak ada penimbunan atau bentuk penyalahgunaan yang lainnya dan pelaku usaha Pom Mini memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pendistribusian BBM serta memiliki izin usaha oleh masyarakat Kota Batu. Dan apabila ada yang melanggar akan dikenai sanksi yang sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.